

# Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Relasi Teks Keagamaan dengan Realitas Lokal”**

## WACANA

**Achmad Ubaedillah**

**Takwil Tradition in Malay Literary Works:  
Islamic Spiritual Insights in Danarto’s  
Nostalgia**

**M. Ikhsan Tangkok**

**The Cult of the Dead in Chinese-Hakka  
Family and Society in Singkawang-West  
Kalimantan**

**Ahmad Abrori**

**Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin  
Boram Civil Society**

## BOOK REVIEW

**Edwin Syarif**

**Intuisi Bagi Dunia Modern**

## TULISAN LEPAS

**Nawiruddin**

**Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan**

**Agus Nugraha**

**Pemilihan Presiden dalam Islam**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VI, No. 3, 2004

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajarah  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7491820, 7440425  
Email: aosantosa@yahoo.com

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Articles*

- 275-292 Takwil Tradition in Malay Literary Works: Islamic Spiritual Insights in Danarto's Nostalgia  
*Achmad Ubaedillah*
- 293-306 The Cult of the Dead in Chinese-Hakka Family and Society in Singkawang-West Kalimantan  
*M. Ikhsan Tanggok*
- 307-330 Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin Buram Civil Society  
*Ahmad Abrori*
- 331-346 Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran Al-Jashshāsh dalam "Aḥkām Al-Qur'ān"  
*Lilik Ummi Kaltsum*
- 347-362 Asbāb al-Nuzūl Skala Mikro Konteks Kesejarahan Al-Qur'an  
*Rifqi Muhammad Fatkhi*

### *Book Review*

- 363-368 Intuisi Bagi Dunia Modern  
*Edwin Syarif*

### *Document*

- 369-388 Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan  
*Nawiruddin*
- 389-404 Pemilihan Presiden dalam Islam  
*Agus Nugraha*

## RELASI TEKS KEAGAMAAN DENGAN REALITAS LOKAL

**P**erkembangan sosial tidak selalu selanggam dengan kehendak agama, begitu pun sebaliknya. Itulah sebabnya dialog dan komunikasi menjadi tak terelakkan untuk kepentingan eksistensi masing-masing entitas, baik entitas agama maupun sosial. Dialog dan komunikasi menjadi penting pula karena setiap realitas memiliki ciri lokalitasnya yang menjadi pembatas dari realitas-realitas lainnya. Itulah sebabnya tafsir atas agama dan teks-teks sosial lainnya tidak bisa dilepaskan dari konteks lokalitasnya. Agama pun hadir melalui media lokal dengan misi universal.

**Refleksi** kali ini menurunkan wacana seputar dekonstruksi teks sosial keagamaan dengan melihat keunikan lokalitasnya. Lokalitas di sini di samping mengacu pada konteks wilayah, juga dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan dalam langgam yang khas dan lokal. Seperti tulisan Achmad Ubaedillah yang menelaah ekspresi spiritualitas seorang seniman kenamaan, Danarto, yang memakai medium lokal. Tidak seperti kebanyakan seniman muslim lainnya yang memakai medium keislaman universal, Danarto menuangkan pengembaraan spiritualitasnya melalui simbol-simbol Hindu-Jawa. Hal ini terlihat jelas dalam karyanya berjudul “Nostalgia” yang memakai tokoh-tokoh Hindu seperti Mahabharata, Arjuna, Kresna, Bisma, dan Abimanyu. Ini tidak lepas dari pengaruh sosial-budaya Jawa yang telah ikut membentuk Danarto.

Fenomena lain yang menunjukkan realitas lokal keagamaan adalah upacara kematian masyarakat Cina (keluarga Hakka) Singkawang yang memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti ditulis oleh M. Ikhsan Tanggok bahwa signifikansi upacara kematian tersebut tidak hanya terkait dengan emosi keagamaan, tetapi juga menjadi momen pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ekonomi maupun politik. Ia juga berfungsi sebagai mediator antara keluarga sebagai penyembah dengan yang meninggal atau nenek moyang sebagai yang disembah. Dengan ritual, keluarga yang masih hidup dapat membangun relasi dengan cara mengirimkan doa untuk nenek moyangnya dan meminta bantuan keselamatan bagi kehidupannya di dunia nyata.

Telaah fenomena sosial dalam konteks realitas lokal terlihat dalam analisa yang disajikan oleh Ahmad Abrori. Ia melihat relasi tradisi lokal dengan kemungkinan perwujudan *civil society*. Dengan mengambil kasus jawara Banten, tulisan ini mengupas dominasi jawara Banten (yang berakar pada tradisi lokal) terhadap perangkat-perangkat modern semisal birokrasi, organisasi massa, partai politik dan lembaga berorientasi bisnis. Sebagai kajian sosiologi-politik, studi ini mengungkap bagaimana peran jawara dalam berusaha memperoleh dan mempertahankan dominasinya di daerah Banten. Dengan menebar semboyan “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” kepada masyarakat, mereka ingin menggambarkan tentang pengetahuan, keyakinan, dan sistem nilai yang mereka anut yang menjadi referensi bagi perilaku mereka di masyarakat. Dalam kacamata *civil society* (masyarakat madani) kenyataan tersebut merupakan potret buram yang bisa menenggelamkan nasib *civil society* itu sendiri.

Sikap dan ekspresi keberagamaan tidak bisa dilepaskan dari metode penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Lebih spesifik lagi, penafsiran itu diwarnai oleh sosok sang mufasir sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami model penafsiran bisa juga dilacak melalui pemahaman terhadap sang mufasir. Dari sana akan ditemukan latar belakang corak keilmuannya sehingga memunculkan warna tafsir tertentu. Itulah yang ditulis oleh Lilik Umami Kaltsum dalam menelaah sosok al-Jashshāsh pengarang kitab *Aḥkām Al-Qur’ān*. Menurut Lilik, al-Jashshāsh berupaya memasukkan paham-paham mazhabnya, mazhab Hanafi, pada ayat-ayat yang dibahas sehingga penafsirannya meluas dan melebar dari ayat pokok bahasan serta terkesan sebagai kitab fikih Hanafiyah.

Cara lain untuk memahami teks keagamaan adalah melalui pemahaman latar belakang pewahyuannya. Ulasan ini ditulis oleh Rifqi Muhammad Fatkhi yang menelaah al-Qur’an sebagai media tekstual ketuhanan yang pewahyuannya terkait dengan konteks historis. Klaim tentang al-Qur’an sebagai teks yang universal yang relevan sepanjang zaman (*shāliḥ li kulli zamān wa makān*) patut dipertahankan secara rasional. Oleh karena itu, agar al-Qur’an mampu menyapa setiap pembacanya secara kontekstual, maka diperlukan telaah terhadap latar belakang sosial (konteks historis) al-Qur’an, yang dalam skala mikro dikenal dengan istilah *Asbāb al-Nuzūl*.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan dua tulisan yang terkait dengan fenomena politik kontemporer. Ada dua telaah yang mengupas fenomena

kontekstual, yaitu tentang *civil society* dan pemilihan presiden, dengan melacak benang merahnya pada khazanah klasik. Tulisan Nawiruddin mengkaji relasi *civil society* sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang demokratis dengan konsepsi-konsepsi Islam masa lalu. Menurutnya masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang otonom yang mampu mengimbangi kesewenang-wenangan elite yang mendominasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat madani atau *civil society* merupakan sebuah keniscayaan atau *condition sine quo non* bagi sebuah negara demokratis. Demokrasi dan masyarakat madani atau *civil society* merupakan dua entitas yang korelatif. Demokrasi hanya bisa tegak dalam masyarakat madani dan masyarakat madani tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang tidak demokratis. Di dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan, melindungi dan menghormati hak-hak warga negara, baik hak-hak politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah.

Sejatinya agama menawarkan banyak konsep yang bisa diterapkan dalam berbagai level kehidupan, termasuk kehidupan politik. Dalam konteks ini Agus Nugraha menyajikan telaah khazanah pemikiran Islam terkait dengan pemilihan presiden dalam Islam. Kontekstualitas tulisan ini terletak pada eksistensi masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia yang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi negeri-negeri muslim lainnya dalam memilih pemimpinnya. Dalam konteks ajaran Islam, pemilihan presiden bisa mengacu pada praktik pemilihan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam berikutnya. Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas memberikan pola dalam memilih pemimpin, namun para pemikir Islam telah menawarkan konsep-konsep tentang bagaimana cara umat Islam memilih presidennya. Secara umum ada tiga pola pemilihan presiden dalam Islam, yaitu pola penunjukan, pola musyawarah para tokoh wakil rakyat, dan pola pemilihan langsung oleh rakyat.

Pada rubrik *Book Review* kami menyajikan tulisan Edwin Syarif yang mengulas buku karya David G. Myers berjudul *Intuisi: Fungsi Insting dan Naluri untuk Meraih Kesuksesan*. Buku ini menjelaskan adanya dua aliran pemikiran yang sangat berpengaruh sampai saat ini, yaitu rasionalisme yang menekankan pada rasio dan empirisme pada indrawi. Keduanya telah

melahirkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda. Rasionalisme dengan metode deduktifnya melahirkan ilmu-ilmu pasti sedangkan empirisme dengan metode induktifnya melahirkan ilmu-ilmu alam. Kedua aliran pemikiran tersebut-Rasionalisme dan Empirisme-telah mewarnai cara berpikir Barat selama tiga abad dan telah menghasilkan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa.

Selain akal dan indera, hati juga menjadi sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam. Penamaan pengetahuan ini ada yang menyebut dengan pengetahuan intuisi, sementara Nasr menyebutnya pengetahuan *'irfan* dalam pembahasan tentang epistemologi Mulla Sadra. Sebagian dari ilmuwan modern, di antaranya adalah Pascal, seorang ahli matematika yang cukup terkenal, William James, ahli ilmu jiwa dan filosof terkenal berkebangsaan Amerika, Alexis Carrel dan Bergson, menganggap hati sebagai sumber pengetahuan sebagaimana akal dan indera.

Sebagian tulisan yang tersaji dalam **Refleksi** kali ini merupakan rangkaian upaya untuk menemukan kembali aktualitas dan kontekstualitas ekspresi keberagaman melalui penafsiran terhadap teks-teks agama, baik secara langsung maupun melalui realitas historis sang penafsir. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2004

*Redaksi*

## PERILAKU POLITIK JAWARA BANTEN: CERMIN BURAM CIVIL SOCIETY

**Ahmad Abrori**

Sosiologi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
*ahmad.abrori@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *For a long time, Indonesia has been an interesting locus of study regarding the relationship between tradition and modernity. By taking the case study of the Banten champions, this paper reveals the dominance of the Banten champions (rooted in local tradition) over modern devices such as bureaucracy, mass organizations, political parties, and business-oriented institutions. As a sociopolitical study, this research examines the role of champions in attempting to obtain and maintain their dominance in the Banten region. They spread the slogan "Defend Yourself, Defend the Nation, Defend the State" to the community. This slogan is nothing but a reflection of the knowledge, beliefs, and value systems they adhere to, which serve as a reference for their behavior in society, which is actually counterproductive to the establishment of civil society.*

**Keywords:** *Civil society, Politics, Champions, Behavior, Culture, Banten Community, Indonesia.*

**Abstrak:** Sudah lama Indonesia menjadi lokus kajian menarik mengenai hubungan tradisi dan modernitas. Dengan mengambil studi kasus jawara Banten, tulisan ini mengungkap dominasi jawara Banten (yang berakar pada tradisi lokal) terhadap perangkat-perangkat modern semisal birokrasi, organisasi massa, partai politik dan lembaga berorientasi bisnis. Sebagai kajian sosiologi-politik, studi ini menelaah peran jawara dalam berusaha memperoleh dan mempertahankan dominasinya di daerah Banten. Mereka menebar semboyan “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” kepada masyarakat. Semboyan itu tak lain merupakan gambaran pengetahuan, keyakinan, dan sistem nilai yang mereka anut yang menjadi referensi bagi perilaku mereka di masyarakat yang justru kontraproduktif bagi tegaknya civil society.

**Kata Kunci:** Masyarakat Madani, Politik, Jawara, Perilaku, Budaya, Banten, Indonesia.

## Pendahuluan

Studi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan pada perilaku jawara yang memainkan perannya (*role playing*) di daerah Banten. Sebagai elemen sosial, tampaknya jawara mempunyai pengaruh kuat di Banten dan seringkali mengambil sikap yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Didukung oleh studi historis-antropologis sebelumnya mengenai Banten dan Jawa, seperti Kartodirdjo,<sup>1</sup> Hamid,<sup>2</sup> dan Tihami<sup>3</sup> jawara memang berhak mengklaim bahwa mereka adalah orang lama dari elemen sosial Banten yang cukup berpengaruh. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi pemimpin masyarakat untuk bidang ekonomi, bidang politik (birokrasi) atau bidang agama. Sebagai pemimpin masyarakat atau elite sosial, jawara juga mendapat dukungan anak buah jawara yang hampir tersebar di seluruh wilayah Banten.

Keberadaannya sebagai elite sosial yang berpengaruh dan cenderung mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, memperlihatkan bahwa jawara adalah orang-orang yang ikut serta berpolitik. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana perilaku politik jawara dalam proses politik yang terjadi di Banten. Kemudian penelitian ini memilih sebuah organisasi jawara yang bernama Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPP-SBBI)<sup>4</sup> yang sekretariat pusatnya terdapat di Serang. Dipilihnya organisasi tersebut mengingat para jawara yang akan dijadikan informan sesuai dengan konsep yang telah dibuat, tidak menetap pada suatu desa tertentu tetapi menyebar di beberapa desa atau kecamatan.<sup>5</sup> Selain itu, Serang merupakan Ibukota Provinsi Banten

di mana suhu politik cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain.

Pada kasus jawara, perilaku politik mereka difokuskan pada budaya politik (pengetahuan, keyakinan dan sistem nilai yang mereka anut) dan kepemimpinan jawara.

Secara konseptual, perilaku politik itu sendiri dalam literatur sosiologi dipandang sebagai tindakan sosial (*social action*) orang-orang yang berkaitan dengan masalah-masalah kekuasaan (*power*).<sup>6</sup> Seperti yang dijelaskan Weber, tindakan sosial (*social action*) adalah (1) setiap perilaku individu yang mempunyai makna subjektif yang diperoleh dari ide-ide yang ada dalam pengalaman hidupnya, (2) tindakan menjadi bermakna sosial ketika aktor menganggap penting perilaku orang lain dan tindakan itu diarahkan oleh harapan-harapan yang ia miliki. Dengan kata lain, pikiran, pengetahuan, dan orientasi seseorang terhadap orang lain adalah penting untuk membentuk seluruh perilaku sosialnya.<sup>7</sup> Dalam kasus jawara, pembentukan perilaku sosial mereka tentu juga didasarkan pada pikiran, pengetahuan dan orientasi mereka. Dengan maksud mencari tahu perilaku politik jawara, maka dianggap signifikan untuk meneliti pengetahuan, keyakinan dan sistem nilai yang mereka anut yang dalam kesempatan ini dijadikan konsep untuk budaya politik.

Untuk keperluan menjelaskan konsep perilaku politik dalam literatur sosiologi ini, maka saya kira perlu tambahan penjelasan. Bahwa perilaku politik, seperti telah disebut di atas, berkaitan dengan persoalan kekuasaan (*power*) maka kekuasaan harus diartikan sebagai gejala sosial. Yakni, bagaimana seseorang *memperoleh dan mempertahankan kepemilikan barang-barang langka* berupa nilai-nilai (*values*) seperti kekayaan, kehormatan, kekuasaan politik, dan pengetahuan (Soemardi, 1984:30-43).<sup>8</sup> Dalam menelusuri kasus perilaku politik jawara, konsep sosiologis ini cukup membantu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara mereka mempertahankan kekuasaan atau dominasi di bidang politik, dan bagaimana hubungannya dengan dominasinya di bidang lain (ekonomi dan sosial).

### **Budaya Politik Jawara**

Pengetahuan dan Keyakinan Politik Jawara. Perilaku politik secara sederhana bisa dipahami sebagai tindakan sosial seseorang atau sekelompok orang berdasarkan pengetahuan, keyakinan dan sistem nilai yang dimilikinya untuk mendapatkan *values* berupa kekuasaan (*power*), kekayaan

(ekonomi) atau kehormatan (status). Nilai-nilai atau *values* itu merupakan modal bagi mereka untuk bisa mempengaruhi orang atau kelompok lain serta proses politik yang ada.

Berkaitan dengan perilaku politik jawara, maka pengetahuan, keyakinan dan sistem nilai —yang dalam tulisan ini dijadikan sebagai konsep budaya politik pada komunitas jawara amat penting untuk diteliti.

Tampaknya, budaya politik jawara tergambar pada doktrin yang mereka anut. Dalam pemahaman kelompok jawara, terdapat doktrin “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara”. Doktrin ini juga sekaligus merupakan moto bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan doktrin tersebut? Berikut penjelasan Csn:

*“Kita secara nasional harus mempunyai wawasan kebangsaan. Bela diri itu artinya jihad. Jangan kamu jadi pegawai negeri, jadi pejuang, tapi keluarga kamu nggak makan, nggak sekolah itu sih pembinaan namanya. Makanya utamakan bela diri. Bela diri itu jihad. Jangan seperti semboyan sekarang, “jangan mengutamakan kepentingan pribadi, harus mengutamakan...” itu mah bohong, di belakangnya mah hmmm... (Csn menggeram sambil jari-jari tangannya digerakkan seperti sedang mengeruk-ngeruk sesuatu).*

*Bela bangsanya, yaitu tadi nasionalisme. Yang ada di Republik Indonesia ini suku apa saja itu kita harus bela. Itu kan anugerah Allah, yah itu kan kita seibu seapak, yang namanya Nabi Adam kan? Kita bukan keturunan ketek, keturunan monyet, tapi kita ini keturunan manusia.*

*Bela negara, yaitu jaga kehormatan negara kita. Jangan ini mah gambar ibu presiden dan wakil presiden dibeuleum (dibakar). Wah ini sih sudah moral. Maksud saya jangan sampai ini jadi budaya. Setiap pemimpin heunteu dihormati. Nggak boleh itu, kan ini sudah melalui konstitusi demokrasi, bukan penyerobotan kup. Makanya kita bohong, konstitusi demokrasi tapi malah mencabik-cabik konstitusi demokrasi. Ini mahasiswa sekarang”.*

Makna “Bela Diri” dengan demikian, menurut Csn, berarti jihad. Istilah jihad sebenarnya berasal dari ajaran Islam. Jihad dalam Islam diartikan dengan “mengaktualisasikan segala kemampuan untuk menegakkan nilai-nilai ajaran agama”. Dalam pengertian umum di masyarakat, jihad berarti perjuangan untuk membela sebuah keyakinan atau prinsip hidup. Dalam melaksanakan jihad, setiap pelakunya harus berani mengorbankan segala yang dianggap paling berharga bagi dirinya, seperti keluarga, harta kekayaan, bahkan jiwanya sendiri. Pengorbanan itu tidak lain adalah

untuk membela nilai-nilai yang lebih tinggi, yakni keyakinan dan prinsip hidup.

Tetapi yang bisa dipahami dari penjelasan Csn, jihad dalam pengertian “Bela Diri” itu lebih bersifat pada pembelaan ke sesuatu yang bersifat materi. Jihad diartikan sebagai perjuangan untuk bertahan hidup (*survive*). Bagi masyarakat miskin seperti pada umumnya di Banten, konsep ini menjadi menarik karena bisa menjadi legitimasi bagi mereka —yakni para jawara dan simpatisannya untuk mempraktikkan apa yang diungkapkan Csn. Apalagi di kelompok jawara, Csn diakui sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh.

Konsep “Bela Diri” sebagai suatu pembelaan atas hal-hal yang bersifat materi dalam arti lainnya adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Oleh karena itu semboyan “jangan mengutamakan kepentingan pribadi, harus mengutamakan...” ditolak mentah-mentah oleh Csn. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana agar keluarga bisa tetap makan dan anak-anak bisa sekolah. Pemahaman ini tentu saja tidak salah karena setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tetapi bila jihad sebagai sebuah konsep ideal diartikan semata-mata dengan pengutamaan masalah materi, tentu mengalami pemroduksian makna.

Sementara doktrin “Bela Bangsa Bela Negara” dalam penjelasan Csn di atas kental dengan nilai-nilai nasionalisme. Atau dalam penjelasan Smt bahwa “jawara, sebagai jati diri warga Banten, diamanatkan oleh pendiri untuk menumbuhkembangkan jiwa patriotisme yang ksatria”.

Namun, doktrin “Bela Bangsa Bela Negara” yang menumbuhkembangkan jiwa patriotisme itu mempunyai nuansa-nuansa masa lalu. Dalam sejarah lokal, para jawara Banten adalah sosok-sosok pejuang yang mempunyai keberanian yang luar biasa dalam menentang penjajah. Keberanian luar biasa itu dicerminkan dengan 19 kali pemberontakan jawara bersama kiai dan masyarakat Banten terhadap pemerintah jajahan sepanjang masa 1810 sampai 1870. Salah satu tokoh pejuang yang paling terkenal saat itu adalah KH. Wasyid.

Yang menarik dari perspektif sejarah ini adalah pengakuan bahwa mereka yang berjuang menentang penjajah itu adalah yang dimaksud jawara untuk konteks masa lalu. Para pejuang seperti Teuku Umar dan Ki Wayid disebut-sebut oleh Csn sebagai orang-orang yang kepribadian jawara. Dengan demikian jelas bahwa doktrin “Bela Bangsa Bela Negara”

adalah untuk menumbuhkan jiwa patriotisme para jawara untuk membela negara.

Doktrin ini mempunyai pengaruh pada keyakinan politik yang dimiliki oleh para jawara. Hal ini terlihat pada sikap mereka terhadap pemerintah. Mereka percaya apa yang dilakukan pemerintah adalah seluruhnya benar. Kepercayaan ini merupakan penjelmaan orientasi afektif, yakni perasaan mengidentifikasi diri dengan identitas kebangsaan. Sikap yang bersumber pada orientasi afektif ini penting bagi ketertiban dan kestabilan masyarakat. Sikap yang demikian juga sekaligus menghapus *image* buruk jawara sebagai gerombolan pengacau atau pemberontak (dalam perspektif pemerintah) baik masa penjajahan (abad 19 dan 20) maupun masa Orde Lama.

Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah itu menjadi sumber keyakinan bahwa pemerintah “jangan didemo karena mereka orang-orang kita”, bahwa “orang-orang yang berdemonstrasi adalah mencoreng citra Banten di mata provinsi lain”, bahwa “demo mengganggu kerja pemerintah”, “Tidak boleh demo karena (pemerintah terpilih) sudah melalui konstitusi demokrasi, bukan penyerobotan kup”.

Mereka percaya ada jalan lain dalam menyampaikan aspirasi, yakni dengan cara “persuasif jangan bawa massa”, “memberikan kepercayaan kepada pemimpin masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah”, “disampaikan dengan cara tertulis”. Dalam perspektif para jawara, demonstrasi lebih baik dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu keamanan. Apa yang dimaksud dengan tidak mengganggu keamanan salah satunya adalah tidak mengganggu kerja-kerja pemerintah.

Namun yang penting untuk diperhatikan adalah pandangan jawara bahwa pemerintah yang ada telah terbentuk melalui konstitusi demokrasi. Dengan pandangan ini, demokrasi masih dipahami sebagai bentuk kegiatan-kegiatan politik yang bersifat prosedural, seperti pemilihan gubernur dan rutinitas kerja-kerja eksekutif dan legislatif lainnya. Maka, demonstrasi adalah tindakan yang berada di luar jalur prosedur demokrasi, tindakan yang mengarah kepada perilaku destruktif dan tak bermoral, seperti membakar bendera dan lain sebagainya. Tindakan yang demikian diyakini oleh jawara sebagai bentuk pelanggaran konstitusi demokrasi dan bisa menimbulkan persepsi buruk tentang Banten di mata orang lain.

## Penilaian Jawara atas Peran yang Harus Mereka Lakukan

Menurut Wasburn, dalam memahami suatu keyakinan dan sistem nilai (*shared belief and value system*) sebuah kelompok, pertanyaan penting yang perlu diajukan —seperti yang dilakukan oleh Almond dan Verba adalah apa peran yang harus dimainkan dalam komunitas lokal mereka.<sup>9</sup>

Dengan doktrin “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” dan keyakinan politik seperti yang tergambar di atas, mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang siap membantu melakukan pengamanan masyarakat. Peran sebagai keamanan ini adalah, menurut mereka, dalam rangka melakukan bela bangsa bela negara. Dengan kata lain, untuk membela bangsa dan negara, mereka memerankan diri sebagai petugas keamanan. Peran ini yang mereka pilih karena sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, yakni menguasai jurus-jurus silat dan kemampuan magis. Di samping itu, mereka terbiasa dengan alat-alat tradisional seperti golok, pisau, kapak, sebagai alat pengamanan yang dipakai dalam tradisi dunia persilatan. Dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi, alat-alat tradisional ini merupakan perlengkapan yang senantiasa dibawa dan menjadi ciri khas mereka.

Peran dan alat-alat tradisional ini sebenarnya mempunyai keterkaitan historis dengan masa lalu. Para jawara yang berjuang melawan penjajah banyak tergabung dalam tentara-tentara rakyat seperti Laskar Rakyat, Bambu Runcing, Hizbullah, dan fi Sabilillah. Dengan kata lain, pada masa penjajahan para jawara berperan sebagai ‘tentara fisik’.

Saat sekarang istilah ‘tentara fisik’ itu diganti dengan ‘tentara wakaf’. Mereka menyatakan diri sebagai ‘tentara wakaf’, sehingga yang dipentingkan adalah patriotisme dan keikhlasan. Dengan memerankan diri sebagai ‘tentara wakaf’ itulah mereka mencoba berusaha mengamankan kegiatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang dipandang strategis.

Dengan peran yang demikian, ditambah dengan pengetahuan dan keyakinan politik yang mereka miliki, maka jawara cenderung berposisi diametral dengan kelompok-kelompok kritis yang berasal dari organisasi kemahasiswaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, apabila kelompok-kelompok kritis tersebut berdemonstrasi untuk mengemukakan aspirasi mereka, maka jawara siap siaga untuk menjadi pagar pengaman lembaga pemerintah yang menjadi objek massa demonstran.

Dalam rangka memerankan diri sebagai petugas keamanan dan diperlengkapi dengan alat-alat senjata tradisional, watak keras dan tindakan kekerasan para jawara sangat terlihat pada tindakan yang mereka ambil. Para jawara selalu siap mengambil tindakan apa pun yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, termasuk mengadu fisik.

Watak keras yang menentang demonstrasi karena dianggap mengganggu keamanan bagi mereka adalah sikap untuk menjunjung tinggi kehormatan negara. Watak keras ini, sekali lagi, bisa merujuk pada dimensi historis masyarakat Banten. Keras dalam menghadapi pemerintah (penjajah dan Orde lama) dalam kurun waktu yang cukup panjang dan berulang-ulang, bisa jadi memberikan kontribusi pada watak keras yang dianut oleh masyarakat Banten, khususnya para jawara. Budaya kekerasan inilah mungkin yang mempengaruhi tindakan politik yang dilakukan oleh Jawara.

Saat ini, budaya kekerasan itu juga dipraktikkan dengan cara-cara masif, seperti yang pernah dilakukan oleh para jawara dahulu. Pada saat pemilihan gubernur misalnya, konon suhu politik ketika proses pemilihan sudah sampai pada tahap akhir, yakni memilih gubernur dan wakil gubernur, cukup panas. Ini ditandai dengan terjadinya dua kali penundaan pemilihan dari jadwal yang telah ditentukan. Baru pada kali ketiga proses pemilihan bisa dilakukan. Itu pun suasana di luar dewan tak kalah panasnya, karena ada isu akan datangnya massa demonstran yang menolak dilangsungkannya pemilihan dan menuntut pemrosesan ulang. Dengan alasan untuk mengamankan dewan dari para demonstran, lalu jawara mengerahkan anak buahnya sebanyak 10.000 orang yang diperlengkapi dengan alat-alat tradisional, seperti golok, pisau dan kapak.

Budaya kekerasan yang dipraktikkan dengan cara-cara masif itu juga dilakukan pada acara-acara seremonial lainnya seperti Sidang Umum DPR/MPR, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ke DPRD Banten, kedatangan pejabat dari luar Banten, dan lain sebagainya.

Pada saat ini, cara-cara masif itu mudah dilakukan karena beberapa faktor: *pertama*, mendapat dukungan organisasi. Bentuk organisasi yang terstruktur secara rapi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, memudahkan pemobilisasian para jawara. *Kedua*, jawara mempunyai hubungan dekat TNI/Polri, pejabat dewan/legislatif, pemerintah eksekutif, dan lembaga kejaksaan. Mereka bahkan menganggap TNI/Polri sebagai 'mitra' dalam hal keamanan. Dengan kata lain, keberadaan jawara

mendapatkan legitimasi dari lembaga-lembaga resmi. *Ketiga*, para jawara (atau lebih tepatnya: para anak buah jawara) menganggap tugas mengamankan demonstrasi sebagai sumber ekonomi mereka. Dari pengamatan yang peneliti lakukan, selama melakukan pengamanan, kesejahteraan mereka terjamin seperti makan, minum, rokok, uang pengganti transpor yang mereka pakai, dan uang lelah. Dengan kata lain, melakukan pengamanan adalah juga merupakan ‘pekerjaan sampingan’.

Faktor yang ketiga ini erat kaitannya dengan kondisi umum status sosial ekonomi masyarakat Serang—dan Banten secara umum. Ketika masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat, 11 persen dari masyarakat miskin Jawa Barat berada di kawasan Banten dan 60 persen penduduknya berpendidikan sekolah dasar.<sup>10</sup> Dengan kondisi yang demikian, faktor ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat Banten. Rendahnya tingkat pendidikan juga salah satunya karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit. Maka, pengangguran di Serang juga menempati posisi kedua setelah Kabupaten Tangerang. Namun, memobilisasi jawara tidak hanya berasal dari Serang, tetapi bisa mencakup seluruh Banten. Sementara total jumlah penduduk Banten yang berpredikat pengangguran mencapai 255.173 orang.<sup>11</sup>

Maka bila kembali pada doktrin “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara”, dalam aktualisasi di lapangan, “bela diri” terkesan kuat pada anak buah jawara sebagai bentuk perjuangan untuk memperoleh materi (baca: uang) agar bisa tetap *survive*. Apalagi mereka menganggap tugas keamanan dilakukan jika ada yang ‘meminta pengamanan’. Syarat ini disinyalir terkait erat jaminan kesejahteraan yang akan mereka peroleh.

Maka sebenarnya walaupun mereka menganggap bahwa tugas pengamanan merupakan bentuk peran sebagai ‘tentara wakaf dan sebagai ‘mitra’ TNI/Polri, tak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomis. Kenyataan ini misalnya diungkap oleh Mmt ketika ditanya tentang fenomena maraknya partai-partai dan pemilihan presiden secara langsung. Menurutnya, fenomena tersebut akan menguntungkan masyarakat. Di desanya, orang-orang tergolong ‘netral dan bisa mendapat keuntungan berupa uang politik bagi partai yang mau memanfaatkan mereka. Misalnya dengan membujuk mereka untuk memilih calon presiden dari partai tertentu. Ia sendiri diajak untuk aktif di partai tetapi ia tolak karena tidak jelas *japuk*-nya (baca: uang untuk keamanan).

Sementara bagi pemimpin jawara, kepentingan dibalik doktrin “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” lebih meluas. Csn, misalnya, adalah orang tua bagi wakil gubernur yang sekarang sedang menjabat. Tetapi kepentingan itu juga masih terkait dengan kepentingan ekonomi karena Csn tergolong sebagai seorang pengusaha seperti halnya Smt, Lurah Tn, dan Ap.

Keuntungan dibalik doktrin tersebut terus menerus diupayakan mendapat legitimasi simbolik. Seperti pada kasus proses terbentuknya Banten sebagai provinsi. Awalnya, jawara menolak pembentukan Banten menjadi provinsi. Sikap ini sama dengan apa yang ditunjukkan oleh anggota dewan dari Fraksi Gotong Royong di DPRD Jawa Barat. Namun, setelah tuntutan pembentukan provinsi itu sangat kuat disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat serta didukung oleh kondisi politik nasional yang mendukung semangat otonomi daerah, maka jawara mengubah sikap yang semula menolak menjadi mendukung pembentukan provinsi Banten.

Tetapi segera saja setelah mengubah sikapnya menjadi mendukung pembentukan provinsi Banten, pihak jawara menggaungkan isu bahwa dalam melakukan pembangunan di Banten haruslah dengan melalui pendekatan budaya. Meski pembangunan daerah dengan melalui pendekatan budaya tentu saja tidak salah, tetapi dengan demikian jawara akan tetap mendapat legitimasi simbolik dari budaya dan dukungan struktural yang kuat karena bisa menduduki posisi-posisi strategis. Dengan bantuan partai Golkar sebagai ‘mitra’ dalam berpolitik, jawara bisa merebut kursi wakil gubernur, menguasai suara di legislatif, dan memegang lembaga-lembaga ekonomi resmi seperti Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi Daerah, Kadin Daerah, Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi) dan lain sebagainya.

Selain memerankan diri sebagai orang yang melakukan pengamanan, banyak di antara jawara yang bergerak sebagai pengusaha di bidang konstruksi. Dari pengakuan Csn, para pelaku ekonomi di Banten kebanyakan merupakan kadernya dan mereka adalah anggota PPPSBBI. Dalam pengakuan Smt, ada juga jawara yang juga berprofesi di bidang media, ekonomi (petani, nelayan, buruh pabrik, tukang becak, tukang bangunan), polisi, pejabat eksekutif (pejabat pemerintah provinsi, pejabat pemerintah kotamadya, pejabat pemerintah kabupaten), legislatif (daerah tingkat I maupun daerah tingkat II), serta di lembaga sosial (LSM), lembaga politik (partai) dan pendidikan (guru, dosen, kiai, santri, ustaz). Tetapi dari

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, untuk profesi seperti dosen dan guru sulit untuk diverifikasi di lapangan.

Dari sekian persebaran profesi tersebut, menurut Smt, anggota terbesar PPPSBBI lebih banyak bekerja sebagai “buruh pabrik, tukang becak dan tukang bangunan”.

Tetapi Smt dan Csn tidak mengungkap mengenai posisi golongan orang yang tidak bekerja (*unemployee*), di mana data statistik Kabupaten Serang menjelaskan banyaknya pengangguran di Serang —dan Banten secara umum. Kenyataan banyaknya para pengangguran di tubuh organisasi jawara bisa diperoleh dari penjelasan Mmt. Menurutnya, di PPPSBBI terdapat banyak para pengangguran yang justru karena alasan tidak bekerja itulah ia sendiri lebih memilih untuk bergabung di organisasi tersebut.

Tipe Budaya Politik Jawara. Dengan memerankan diri sebagai orang yang bersedia melakukan pengamanan, maka jawara termasuk kelompok sosial yang ikut berpartisipasi dalam politik lokal. Budaya politik partisipan mengandaikan adanya pelibatan diri seorang warga dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (*voting*), dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik. Ini terbukti dengan persebaran peran jawara di berbagai bidang. Selain mereka bertugas menjaga keamanan, fakta di lapangan menunjukkan adanya beberapa jawara yang menduduki jabatan-jabatan politik strategis, seperti wakil gubernur, Walikota, lurah, ketua partai dan jabatan-jabatan lembaga ekonomi.

Namun, budaya politik partisipan yang dianut jawara lebih mengarah pada budaya politik *kaula-partisipan*. Para jawara yang menduduki jabatan-jabatan strategis pada umumnya dianggap sebagai pemimpin oleh para jawara yang berstatus anak buah. Dengan kemampuan para pemimpin menduduki jabatan strategis ini jelas memahami apa aspek *input* terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, serta aktif terhadap *output* atau kekuasaan dan sistem secara keseluruhan. Mereka itulah yang disebut sebagai partisipan.

Sementara anak buah jawara yang *notabene* cenderung mengikuti apa kata pemimpin menganut model *kaula*. Partisipasi politik yang berorientasi *kaula* adalah partisipasi yang sangat rendah terhadap *input* dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, serta pasif terhadap *output* atau kekuasaan dan sistem secara keseluruhan. Dengan pemimpin jawara yang mapan secara ekonomi, kuat dalam relasi politik, memperoleh legitimasi

struktural, maka partisipasi politik anak buah jawara tak ayal lagi adalah berorientasi *kaula*.

Bentuk partisipasi politik *kaula*-partisipan ini, di samping karena didukung oleh konstruksi budaya politik lokal, juga karena didukung oleh konstruksi sosial-ekonomi masyarakat Banten. Secara terperinci *Banten dalam Angka 2001* mendata persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: tidak tamat SD sebanyak 33.63%, tamat SD 30.08%, tamat SMP 14.54%, tamat SMA 17.68%, tamat DI/II 0.60Yo, dan tamat DIII/Sarjana sebesar 3.48%. Dengan data itu, maka yang termasuk ke dalam kelompok kritis hanya mencapai 4,08 persen, sementara sisanya lebih dari 95 persen adalah orang-orang yang daya kritisnya kurang memadai. Tak pelak lagi dengan adanya kombinasi yang timpang di mana yang kritis merupakan komunitas kecil di antara komunitas besar yang tidak kritis, hal ini jelas mendukung partisipasi politik model partisipan-*kaula*.

### **Pemimpin Jawara**

Cara Jawara Mempertahankan Dominasi. Dalam pandangan Talcott Parsons, yang diutamakan dalam sistem sosial adalah terpeliharanya ketertiban (order), sehingga kekuasaan mempunyai hubungan kuat dengan usaha untuk melakukan kontrol (pengawasan). Adapun bentuk pengawasan dapat berubah-ubah dari yang berbentuk pemaksaan sampai yang sukarela, tetapi penggunaan kekuatan fisik merupakan suatu bentuk yang ekstrem dari cara penggunaan otoritas dan pengawasan atas tindakan-tindakan orang lain.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui seberapa mungkin jawara mempunyai kekuasaan untuk melakukan kontrol salah satunya bisa dilihat dari keyakinan dan perilaku politiknya. Mereka meyakini bahwa pemerintah telah terpilih melalui prosedur demokrasi. Hal ini mempunyai dampak pada pandangannya tentang konsep pemimpin, termasuk pemimpin negara. Bagi jawara, pemimpin yang mengabdikan pada negara dianggap sebagai pendahulu dan guru.

Sebagai pendahulu berarti ia adalah orang tua, dan sebagai guru berarti ia merupakan teladan, yang kedua status sosial itu harus disadap (diikuti). Dengan demikian, pemimpin jawara menganggap pemimpin negara, siapa pun ia, harus dihormati.

Konsep politiknya ini memberikan konsekuensi eksternal, yakni tidak mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah (pusat maupun daerah). Konsep kepemimpinan yang demikian akan membentuk pola perilaku politik pragmatis. Pola perilaku ini ditandai dengan sikap politik yang berintegrasi dengan penguasa dan cenderung mengabaikan label ideologis dalam pemikirannya.

Keyakinan politik jawara tersebut juga dipelihara dengan membangun hubungan simbiosis dengan elite-elite sosial lain, seperti militer, pengusaha, birokrat, akademisi dan partai. Oleh karena itu posisinya sebagai pemimpin jawara sampai sekarang tetap langgeng, . meski pemimpin nasional sudah berganti beberapa kali. Tak ayal lagi sebuah situs internet berbahasa Prancis dan Inggris *Federation* mengganjarnya dengan panggilan yang cukup fenomenal, *the jawara of jawara* (jawaranya jawara Banten).<sup>13</sup>

Kedudukannya sebagai pemimpin menjadi semakin kuat karena ia menduduki posisi penting pada lembaga-lembaga strategis. Bisa dibayangkan dominasi pemimpin jawara dan kelompoknya dengan melihat penguasaan mereka atas: *pertama*, lembaga-lembaga penting ekonomi, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Banten, Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Banten, Gapensi Daerah, serta menjadi pengurus beberapa asosiasi seperti Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAIDO) Banten, Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Banten dan Gabungan Pengusaha Kecil dan Menengah Nasional (GAPEKNAS) Banten. *Kedua*, lembaga-lembaga politis, dari tingkat wakil gubernur, Walikota, lurah, sampai lembaga legislatifnya. *Ketiga*, lembaga-lembaga sosial, seperti Organisasi mantan pejuang Dewan Harian Daerah 45 (DHD 45), Forum Peduli Banten. Keempat, lembaga keagamaan seperti Satuan Karya Ulama. Kelima, media cetak seperti Koran Harian Banten (ikut menanamkan saham).

Cara mempertahankan dominasi dengan memegang kendali kekuasaan pada lembaga-lembaga pemerintah ataupun kelompok kepentingan seperti yang disebut di atas, tak lain adalah upaya untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan lain di luar kelompoknya. Memang demikianlah cara yang dilakukan jawara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Selain itu, persebaran anggota jawara di birokrasi, pengusaha, karyawan pabrik, kiai dan santri, tukang becak, pekerja kasar, pedagang, dan pengangguran, adalah tidak lain hanya memperkokoh dominasi elite jawara di Banten. Sementara kalangan akademik juga menjadi cenderung

tidak berkutik karena jawara mempunyai “budi baik” dengan memberi hibah tanah kepada mereka.

Kekuasaan yang menyeluruh ini membuat pemerintahan di Banten menjadi kurang efektif karena pos-pos strategis “dikuasai” oleh segelintir orang yang berasal dari lingkaran kelompok jawara. Posisi legislatif, misalnya, yang seyogyanya menjadi lembaga *check and balance* terhadap pemerintahan eksekutif, menjadi lemah karena Golkar yang membantu kepanjangan tangan elite jawara sangat menguasai suara dewan. Dengan hubungan semacam itu, legislatif menjadi tidak bisa mengontrol, mengevaluasi secara jernih, dan mendikte kepentingan-kepentingan yang memihak kepada rakyat banyak terhadap pemerintah eksekutif setempat.

Begitu juga bentuk pengontrolan terjadi pada kelompok yang berseberangan dengan jawara. Dengan mengatasnamakan kepentingan untuk melindungi dan menjaga dewan, kelompok jawara tak pernah absen untuk menghalau tuntutan dan aksi-aksi kelompok kritis. Kelompok-kelompok kritis yang terdiri dari mahasiswa, LSM atau lembaga oposan lainnya menjadi sulit bergerak karena pihak jawara dengan keberanian dan senjata tradisionalnya senantiasa siap sedia menghadapi situasi apa pun, sampai pada tingkat kekerasan fisik. Hal ini mengundang ketakutan yang amat sangat bagi siapa pun yang mencoba berseberangan dengan kelompok para jawara ini. Apalagi bentuk partisipasi politik yang kelompok jawara jalankan adalah dengan model *kaula* dan struktur keorganisasian yang amat rapi, mobilisasi massa sangat mudah dilakukan dengan modal kekuasaan dan harta (baca: *uang*). Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal yang menyimpang di tubuh dewan ataupun pemerintah lokal, rakyat secara keseluruhan hanya bisa berbicara di belakang guna mencari selamat, Sikap tidak terbuka dari rakyat ini merupakan buah keterkekangan atas dominasi jawara.

Maka tak salah jika Anderson (dalam Arif Budiman, 1984:52) pernah mengatakan bahwa dalam budaya Jawa, kekuasaan adalah benda konkret yang jumlahnya terbatas dan tetap tidak berubah. Kekuasaan yang berada di luar miliknya mengakibatkan berkurangnya porsi kekuasaannya, maka segala bentuk kritik, oposisi yang menunjukkan pihak ‘awan’ memiliki kekuasaan, harus ditekan. Dalam konteks kelompok jawara, kekuasaan yang mereka peroleh akan dipertahankan dengan sedemikian rupa sehingga legitimasi atas keberadaannya itu tetap bertahan.

Pola Interaksi Antara Pemimpin-Anak Buah Jawara. Keyakinan politik jawara bahwa pemimpin adalah guru dan pendahulu yang harus diikuti, memberikan dampak konsekuensi internal, yakni bahwa elite jawara sebagai pemimpin (di kelompok jawara maupun di lembaga-lembaga strategis) juga harus dihormati. Para elite jawara dianggap sebagai 'Bapak', tetua, atau *kokolot*, yang harus diikuti, dipatuhi perintahnya dan dipenuhi keinginannya.

Adanya dominasi jawara di tangan Csn sangat dipengaruhi oleh pola interaksi yang berlangsung di kalangan mereka. Interaksi itu menjadi cukup intens karena bagaimanapun juga Jawara Banten yang menjadi subjek penelitian ini merupakan sekumpulan orang yang mempunyai organisasi yang rapi.

Meski organisasi merupakan cerminan dari budaya modern, akan tetapi organisasi yang beranggotakan para Jawara Banten, yakni PPPSBBI, mengembangkan pola interaksi antar anggotanya dengan sistem pemimpin-pengikut atau bapak-anak buah. Dalam bahasa sosiologinya, pola hubungan yang mereka kembangkan adalah pola hubungan *patrimonial*. Ciri yang paling menonjol dari pola ini adalah tersentralnya kekuasaan pada satu orang dan orang tersebut, menurut Lande dan Scott,<sup>14</sup> mengembangkan hubungan interaksi yang timpang dalam hal kelas, status maupun kekuasaan dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Dari pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, ada banyak bukti yang menguatkan bahwa pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang tinggi di bidang ekonomi sangat mempunyai peran dominan bagi kelompok jawara secara keseluruhan.

Sebagai elite ekonomi, Csn sedari awal sudah mempunyai landasan ekonomi yang cukup kuat. Ketika birokrat dan militer memanfaatkannya untuk tujuan pembangunan dalam ruang lingkup lokal, ia memperoleh kekayaan yang tak diketahui besarnya, tetapi masyarakat pada umumnya tahu bahwa ia adalah pemilik tempat rekreasi Pemandian Air Panas Batu Kuwung. Tempat rekreasi ini sampai sekarang juga merupakan aset pajak yang cukup penting bagi Pemda Kabupaten Serang. Di tempat ini pula pemerintah Orde Baru dibantu dengan birokrat militer membuat kesepakatan dengan elite Banten.

Penunjukannya sebagai pemimpin jawara merupakan *starting* awal bagi peran dominannya dalam bidang ekonomi. Usaha penjualan beras yang ia geluti sebelumnya secara bertahap berkembang dengan merambah usaha

jasa konstruksi. Perkembangan usaha jasa konstruksinya menuai hasil yang luar biasa bagi pemasukan diri pribadinya maupun bagi pemda setempat. Jalan-jalan yang terbentang antara Cilegon-Labuan, Simpang-Labuang-Cibaliung, dan Simpang-Saketi-Cikande Rangkasbitung adalah buah tangan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan yang ia miliki, PT Sinar Ciomas.

Saat ini kekayaan yang ia miliki tak diketahui secara pasti berapa besarnya, namun ia memegang proyek pembangunan jalan dan pasar tradisional-modern Rau, Serang. Demikianlah usahanya di bawah bendera PT Sinar Ciomas mencakup jasa konstruksi secara umum, *stone crusher*, *manufacture representative*, *asphalt mixing plant*, *heavy equipment*, ditambah dengan jasa pariwisata, serta jual beli tanah. Kekayaan yang dimilikinya ini disebut-sebut oleh warga setempat mampu membeli tanah di seluruh Banten, meski pernyataan ini agak berlebihan dan hanya sebatas perumpamaan atas betapa besar jumlah kekayaannya.

Posisinya sebagai pengusaha tingkat atas mendorong orang-orang yang ada di dekat atau di bawahnya untuk terjun menjadi pengusaha dan menjadikannya sebagai patron untuk bidang ekonomi. Smt, misalnya, seorang pengusaha yang dipercaya untuk menduduki sekretaris jenderal PPPSBBI, juga mempunyai CV Jasa Harapan Makmur yang juga bergerak di bidang konstruksi. Smt pada mulanya adalah seorang jawara yang menguasai ilmu bela diri Debus Suroswan. Jabatannya sebagai sekretaris jenderal mampu mengubah hidupnya untuk menempati pengusaha tingkat menengah. Indikasi perubahan itu bisa diukur dari kepemilikan kendaraan roda empat. Sebelum memegang jabatan itu, ia hanya memiliki mobil Honda Civic keluaran tahun 80. Setelah jabatan itu ia pegang, dan terutama karena keberhasilannya menjadi tim sukses Atut Chosiyah merebut kursi Wakil Gubernur Banten, mobilnya bertambah empat buah yang berbeda jenisnya: Sedan Hyundai, Sedan BMW, Taft, dan Escudo. Semuanya masih terlihat baru.

Patronasi terhadap Csn dalam bidang ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh Smt tapi juga hampir seluruh jawara yang membuka usaha dan bergabung dengan organisasi yang dipimpinya. Hal itu salah satunya dikarenakan Csn menduduki posisi penting pada lembaga-lembaga ekonomi daerah yang sangat strategis.

Sementara bagi anak buah jawara yang lemah secara ekonomi hanya berharap mendapatkan berkah dari kedekatannya dengan para jawara pengusaha, meski tidak langsung dari Csn.

Bila Liddle<sup>15</sup> pernah menggambarkan relasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru dengan bentuk piramida yang Soeharto ada di posisi paling atas, maka begitu pula dengan apa yang terjadi di jawara, dengan Csn berada di posisi paling atas. Setidaknya bentuk piramida kekuasaan itu tergambar pada struktur PPPSBBI yang berjenjang sampai tingkat desa dan anak buah jawara yang tersebar di hampir seluruh wilayah Banten.

### **Hubungan Pemimpin dengan Elite-elite Lain**

Yang dimaksud dengan elite di sini adalah pejabat eksekutif dan legislatif, pejabat militer (TNI/Polri), pejabat partai, dan lain sebagainya yang dipandang mempunyai nilai-nilai yang berharga seperti, harta kekayaan, ilmu pengetahuan, maupun kedudukan politis. Seperti yang telah disebut pada subbab “cara jawara mempertahankan dominasi”, bahwa pola hubungan pemimpin jawara dengan elite-elite sosial lainnya berbentuk hubungan simbiosis.

Pada kasus Csn sebagai pengusaha jawara tingkat atas, di samping kuat secara ekonomi, ia juga pandai menjaga relasi dengan elite-elite lain, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ketika kelompok oposisi terhadap pemerintah Orde Baru bermunculan secara terang-terangan, sikap politik jawara —seperti yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta justru mendukung pemerintahan Orde Baru. Ketika Gedung DPR/MPR diduduki oleh mahasiswa, kelompok jawara datang ke Gedung menyatakan sikap politik mendukung reformasi konstitusional (seperti sikap politik yang dianut oleh kelompok Habibi). Ketika Sidang Umum 1999 untuk memilih Presiden RI ke-4, Roy BB. Janis (legislatif dari PDIP) mengatakan bahwa massa PDIP akan didukung ratusan ribu jawara untuk mendukung pemilihan presiden secara *fair* yang sesuai dengan perolehan suara sebagai bentuk keinginan rakyat.<sup>16</sup> Ketika Presiden Abdurrahman Wahid hendak mengeluarkan keputusan Negara dalam Keadaan Bahaya, ia meminta agar ratusan jawara yang melakukan pertemuan dengannya di kediaman Ratno Timur untuk bersabar meski mereka siap membantu mengamankan keadaan Jakarta.<sup>17</sup>

Terlebih lagi sekarang hubungan dengan pemerintah daerah semakin dekat karena wakil gubernurnya dipegang oleh salah seorang putrinya.

Hubungan antara keduanya lebih bersifat kekeluargaan (*kinship*) antara bapak dengan anak. Dengan demikian hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas simbiosis, tapi juga bersifat struktural yang sangat mengikat di mana adagium “anak tidak boleh melawan bapak” berlaku di sini. Dengan kata lain, hubungan relasi kuasa antara pemerintah daerah dengan Csn, dominasi sepenuhnya dipegang oleh sang bapak.

Dominasi itu juga didukung oleh hubungan dekatnya dengan pihak legislatif, terutama dari fraksi Golongan Karya. Hubungan dekat ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, dari sisi historis, organisasi jawara terbentuk karena ingin mendukung program pembangunan pemerintah Orde Baru yang diimplementasikan oleh birokrat, militer dan Golkar. *Kedua*, beberapa elite jawara merupakan petinggi partai Golkar, seperti salah satunya adalah Lurah Tn. *Ketiga*, jawara itu sendiri begitu dekat dengan militer. Bahkan di struktur kepengurusan hasil Kongres I tahun 1990 menetapkan beberapa birokrat yang berasal dari unsur militer sebagai dewan pembina, di antaranya seperti (Purn) Letjen Solihin GP, (Purn) Mayjen Aang Kunaefi, (Purn) Mayjen Azwar Anas dan (Purn) Mayjen Basopi Sudirman. *Keempat*, beberapa petinggi Golkar merupakan keluarga dekat para jawara. Ketua DPRD Serang, Edi Mulyadi (dari partai Golkar) merupakan kerabat dekatnya sekjen PPSBBI, Smt. *Kelima*, Golkar sukses menjadikan Atut Chosiyah, yang merupakan putri dari Csn, sebagai wakil gubernur terpilih.

Kedekatan Csn dengan elite partai (Golkar) hampir satu nafas dengan apa yang terjadi dengan elite militer. Namun sejauh penelitian yang dilakukan, belum ditemukan indikasi bahwa relasi kekuasaan antara Csn dan elite militer bersifat atas-bawah. Pernah peneliti mencatat adanya pertemuan unik antar keduanya, yakni ketika rombongan Kapolres Serang - yang didampingi oleh Smt melakukan kunjungan ke kediaman Csn untuk silaturahmi. Tetapi perkiraan yang mungkin bisa dikemukakan adalah bahwa kedua belah pihak saling menjaga keutuhan hubungan. Yang jelas, hubungan yang terjalin lebih bersifat simbiosis, saling mendapatkan keuntungan, saling menghormati, dan menganggap keduanya sebagai mitra dalam hal keamanan.

Sementara pada kasus kiai AN, hubungannya dengan militer dan birokrat meluaskan jangkauan kepemimpinannya. Ia tidak hanya dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang mampu memberikan petunjuk

keagamaan, tapi juga dipercaya untuk dimintai pertolongan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pihak berwajib (polisi) atau membantu hal-hal yang berkaitan dengan masalah bisnis.

Dan pada kasus lurah Tn, karena ia merupakan pemimpin formal, maka hubungannya dengan elite lain adalah berbentuk struktural dan resmi. Posisinya sebagai lurah, sebagai Ketua Korwil PPPSBB, serta sebagai Ketua Korwil Partai Golkar menuntutnya untuk membangun interaksi dengan elite baik di pemerintahan, di kejawaraan, maupun di kepartaian.

Dengan kedudukannya sebagai lurah, ia mempunyai hubungan kuasa dengan elite ekonomi yang perusahaannya berada di wilayah kekuasaannya. Masyarakat mempercayakan kepadanya sebagai pemimpin yang bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapat pekerjaan pada perusahaan yang berada di desanya.

### **Pola Perilaku Politik Jawa dan Sistem Politik Lokal**

Dalam penjelasan di atas telah disebut bahwa pola perilaku politik jawa termasuk dalam pola perilaku politik pragmatis. Perilaku politik tersebut berkaitan dengan kepentingan ekonomi (baca: bisnis) yang mereka jalankan.

Oleh karena itu, di antara pemimpin jawa yang terlibat dalam politik adalah jawa pengusaha dan jawa birokrat. Ada dua alasan mengapa mereka cenderung terlibat aktif dalam politik; *pertama*, elite jawa adalah termasuk sebagai kelompok partisipan dari model partisipasi politik *kaula-partisipan*. Sebagai kelompok partisipan jelas mereka sangat memperhitungkan *input* apa yang akan mereka peroleh jika mereka ikut berpartisipasi dalam politik. *Kedua*, mereka adalah orang-orang yang sangat berkepentingan dalam hal politik dan bisnis. Tentu saja *input* yang ingin diperoleh adalah berkaitan dengan keduanya. *Input* yang ingin dikejar adalah bertahannya legitimasi sebagai pemimpin masyarakat, atau diperolehnya bisnis yang menguntungkan bagi pengusaha.

Selain menganut tipe budaya politik *kaula-partisipan*, relasi kuasa yang dibangun antara jawa dengan eksekutif dan legislatif di tingkat lokal menggunakan hubungan kekeluargaan (*kinship relation*). Ini dibuktikan dengan didudukinya kursi ketua legislatif tingkat kabupaten dan kursi wakil gubernur oleh orang-orang yang termasuk keluarga jawa. Model *kinship relation* ini, menurut Waburn, menolak hak-hak untuk *bargaining*

kolektif secara umum. Juga menolak segala usaha untuk membatasi hak-hak kelas pemilik atau untuk mengantarkan perubahan dalam sistem pendidikan, ekonomi dan politik.<sup>18</sup>

Dengan kekuasaan dipegang oleh segelintir orang, maka dapat dipastikan proyek demokratisasi di daerah Banten akan mengalami kendala yang cukup berarti, meski pemilihan umum —sebagai indikator demokrasi untuk gubernur juga telah terlaksana dengan baik. Proyek demokratisasi akan mendapat tantangan kuat karena Jawara telah melakukan penguatan lingkaran kekuasaan dengan mendapat jaminan dari tradisi budaya dan kekayaan yang mereka miliki.

Penguatan lingkaran kekuasaan oleh segelintir orang keluarga jawara itu akan mengakibatkan terbentuknya sistem oligarki. Sistem oligarki meniscayakan kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil masyarakat yang, dengan jaminan budaya dan kekayaannya, berhasil menguasai kursi pemerintahan, legislatif, lembaga-lembaga sosial-politik non-pemerintah, lembaga-lembaga ekonomi baik pemerintah maupun non pemerintah.

Akibat dari sistem oligarki yang dikembangkan jawara ini; *pertama*, malah memperkuat pola hubungan *patrimonial* dalam bisnis dan politik dengan bentuknya yang khas Banten, yakni berdasarkan pendekatan tradisi budaya lokal. *Kedua*, bersamaan dengan itu, terjadinya pengendalian secara efektif beberapa sumber daya dan lisensi, kredit dan lain-lain yang menjadi kunci penghasil kekayaan. *Ketiga*, akibat lainnya, adalah tidak adanya lembaga *civil society* sebagai kekuasaan tandingan dalam arti yang sebenarnya, kecuali dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dan lemah secara ekonomi maupun politik.

Dengan sistem oligarki tersebut —didukung dengan pola hubungan *patrimonial* dan penguasaan secara efektif sumber-sumber penghasil kekayaan maka upaya-upaya untuk penguatan *civil society* mengalami tantangan yang sangat serius. *Civil society* sebagai prasyarat ditegakkannya demokrasi, menurut Gellner (1995:32), seyogyanya menjadi ruang politik (*political space*) yang berfungsi sebagai mediasi bagi berlangsungnya negosiasi antara negara dan masyarakat. Dengan kata lain, *civil society* diandaikan sebagai lembaga non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan negara tapi yang, pada saat yang sama, tidak menghalangi negara menjalankan fungsinya.

Meski Jawara terorganisasi secara rapi, yang dengan demikian ia menjadi lembaga *civil society*, namun ia tidak memosisikan diri sebagai lembaga

mediasi antara kepentingan rakyat dan negara. Malah ia merupakan kekuatan yang mempunyai kekuasaan dominan dan mampu mengontrol segala lapisan kekuasaan baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Cara-cara kekerasan yang mereka manifestasikan dengan kekuatan fisik (silat dan magi), penggunaan senjata tradisional (pisau, golok dan kapak) dan pengerahan massa model *kaula-partisipan* membuat masyarakat tak mempunyai kekuatan apa pun, apalagi untuk menjadi lembaga sosial yang mandiri.

Di tingkat desa sendiri, jawara melakukan dominasi terhadap lembaga pemerintahan desa (kelurahan). Lembaga pemerintahan desa yang diharapkan mengakomodasi kepentingan masyarakat dan menentukan proses pembuatan keputusan dari bawah ke atas (*bottom-up*) di tingkat desa, dalam praktiknya ternyata dikontrol oleh kekuasaan Jawara. Maka yang terjadi bukannya pemberdayaan, pemandirian dan pencerahan (*civilize*) warga, tetapi justru *Decivilasi* warga.

*Decivilasi* warga mencerminkan proses pemangkasan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan menyuarakan hak individualnya sebagai warga negara karena akan berhadapan dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan Jawara. *Decivilasi*, dengan demikian, membuat masyarakat Serang —dan Banten secara keseluruhan menjadi cerminan masyarakat yang sakit: tidak berdaya, tidak mandiri, tak tercerahkan, dan dikuasai oleh ketakutan menyuarakan hak individualnya. Dalam kondisi ini, sejauh masyarakat tetap tidak mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan tidak mampu menjadi lebih mandiri, menurut Hikam (1996:122), maka prospek pemulihan *civil society* akan selalu suram, dan atas dasar itu, proyek demokratisasi akan sulit.

Implikasi lain dari proses *Decivilasi* ini adalah potensi konflik yang tidak terlihat nyata (*manifest*) tetapi masih dalam bentuk tersembunyi (*hidden/latent*). *Hidden conflict* merupakan bentuk konflik yang lebih berbahaya dari pada *manifest conflict*. Konflik tersembunyi ini menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja kesempatan itu ada. Ia menyimpan kebencian budaya (*cultural animosity*) yang tidak hanya bersumber dari perbedaan ciri budaya tetapi juga perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Contoh dari ini adalah seperti apa yang terjadi ketika Orde Baru lengser, kon-

flik terjadi dimana-mana tidak hanya antara pro Orba dengan pro Reformasi, tapi meluas ke antar suku, agama, kelas sosial, kampung dan lain sebagainya (Wirutomo, 2001:6).

Cara yang mungkin untuk mengantisipasi masa depan masyarakat Banten adalah dengan menggunakan *strategi gerilya budaya* yang menghindari penggunaan kekerasan. Perjuangan untuk gerilya budaya ini adalah terutama melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Tetapi strategi ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut tentang cara, aspek-aspek, potensi dan kemungkinan diterapkannya di masyarakat Banten. Ini semua memerlukan kajian tersendiri yang intens, serius dan kontinu.

Tetapi untuk sekarang, kekhawatiran akan munculnya implikasi-implikasi dari proses *Decivilisasi* seperti yang disebut di atas adalah wajar diungkap secara jujur. Dominasi Jawara untuk konteks lokal Banten ternyata hampir mengontrol seluruh bentuk kekuasaan di tiap lapisan pemerintahan dan masyarakat, serta mengontrol sumber-sumber kekayaan materi.

Adalah menarik tesis yang pernah diungkap J.A.C. Mackie<sup>19</sup> bahwa ada saling kait-mengaitkan antara harta dan kekuasaan yang berlaku di negeri seperti Indonesia. Tesis itu didasarkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang masih menerapkan pola hubungan *patrimonial*. Pola ini meniscayakan kekuasaan menjadi tersentral dan hanya dipegang oleh segelintir orang.

Dengan demikian, merujuk pada tesis Mackie tersebut, harta dan kekuasaan di Serang dan Banten secara umum, mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Pemimpin jawara yang berharta dan berkuasa, tampak bak “raja kecil” yang mempunyai struktur pemerintahan dan prajurit yang berasal dari para jawara dan anak buahnya. Masyarakat hanyalah rakyat biasa yang hanya bisa diam dan membiarkan keinginan “rajanya” terlaksana. Oleh karena itu, bila muncul kekhawatiran munculnya raja kecil ketika otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, Banten bisa menjadi salah satu rujukan untuk menjadi bukti terwujudnya kekhawatiran tersebut.

## Catatan Kaki

1. Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.
2. Abdul Hamid, *Tragedi Berdarah di Banten*, Cilegon: Yayasan Kyai H. Wasid, 1987.
3. Tihami, "Kyai dan Jawara Banten, Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang, Banten", *Tesis Antropologi*, UI Jakarta, 1992.
4. Istilah jawara sering digantikan dengan istilah pendekar. Menurut mereka, hal ini untuk menjaga *image* performa mereka. Karena, sebagian masyarakat ada yang menganggap jawara adalah perampok, tukang garong, pencuri barang orang dan lain sebagainya. Anggapan masyarakat ini persis seperti apa yang ditulis Kartodirdjo tentang jawara ketika melakukan studi masyarakat Banten abad 19. Ia mendefinisikan jawara dengan "orang-orang yang umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering melakukan perbuatan-perbuatan kriminal" (Kartodirdjo, 1984:79). Dengan adanya *image* kurang baik tersebut, beberapa penerus tradisi kejawaraan (bahkan sebagiannya mengaku merupakan bagian dari sejarah jawara Banten masa lalu) mengganti istilah mereka dengan pendekar. Untuk hal ini Tihami mendefinisikan pendekar Banten ini dengan "orang-orang yang dengan keberaniannya karena menguasai ilmu-ilmu silat dan (sebagiannya) menguasai ilmu kekebalan, berusaha berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam hal keamanan". Terkadang mereka menyebut diri mereka sebagai *pendekar pembangunan*. Meski demikian, di masyarakat istilah jawara masih terus dipakai dalam kosa kata sehari-hari untuk menunjuk diri mereka yang mengaku pendekar. Masyarakat Banten memanggil mereka dengan jawara (logat Sunda), *juware* atau *jeware* (logat Jawa Banten).
5. Informan berjumlah 10 orang, mereka itu Csn, Smt, dan Mmt mewakili jawara yang bergerak di bidang ekonomi, Kyai AN dan Slmt jawara yang mendalami bidang agama, Lurah Tn, Spr dan Ubd adalah jawara yang menyibukkan diri dalam bidang politik, Aap (kepala kesekretariatan) dan Ccp sebagai pejabat pemerintahan provinsi.
6. Soelaeman Soemardi, "Cara-cara Pendekatan Terhadap Kekuasaan Sebagai Suatu Gejala Sosial", dalam Miriam Budiardjo (ed), *Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
7. Perdue, William D., *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*, California: Mayfield Publishing Company, 1986, 177.
8. Soelaeman Soemardi, *op.cit.*, 30-43.
9. Philo. C. Wasburn, *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypotheses*, New Jersey: Prentice-Hall, 1982, 187.
10. *Kompas*, 13-09-2000, "Banten Berpisah Karena Terbelakang".
11. *Banten dalam Angka 2001*, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2001.
12. Soelaeman Soemardi, *op. cit.*, 32.
13. *Federation* "La PPSBBI", <http://www.google.com/perso.wanadoo.fr/.saolim/silat2/pages/federation.html>
14. Baik Lande maupun Scott menganggap bahwa *patrimonialisme* atau istilah lainnya *sistem bapak-anak buah* atau *sistem pemimpin-pengikut* merupakan pola hubungan antara dua individu/ kelompok yang tidak sederajat, baik dari kelas, status, maupun kekuasaan. Lihat Carl H Lande, "The Dyad Basis of Clientalism", dalam Schmidt, Guasti, Lande, dan Scott (eds.), *Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientalism*, Berkley: University of California, 1977, xx; dan lihat James. C Scott, "Patron Client Politics and Political Change in Southest Asia," *American Political Science Review*, LXVI, March, 1972, 91-113.

15. Liddle, R. William, *Leadership and Culture in Indonesia Politics*, Sidney: Allen and Unwin, 1996, 18-20.
16. *SiaR*, 15-10-1999.
17. *Media Indonesia*, 19-07-2001.
18. Philo. C. Wasburn, *op. cit.*, 309.
19. Mackie, JAC., "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru", dalam *Prisma* 2 Februari 1984, 32.

### Daftar Pustaka

- Hamid, Abdul. *Tragedi Berdarah di Banten*, Cilegon: Yayasan Kyai H. Wasid, 1987.
- Kartodirjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Lande, Carl H. "The Dyad Basis of Clientalism", dalam Schmidt, Guasti, Lande, dan Scott (eds.), *Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientalism*, Berkley: University of California, 1977.
- Liddle, R. William, *Leadership and Culture in Indonesia Politics*, Sidney: Allen and Unwin, 1996.
- Mackie, JAC., "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru", dalam *Prisma* 2 Februari 1984.
- Perdue, William D., *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*, California: Mayfield Publishing Company, 1986.
- Philo. C. Wasburn, *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypotheses*, New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- Scott, James C. "Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia," *American Political Science Review*, LXVI, March, 1972.
- Soemardi, Soelaeman. "Cara-cara Pendekatan Terhadap Kekuasaan Sebagai Suatu Gejala Sosial", dalam Miriam Budiardjo (ed), *Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Tihami, "Kyai dan Jawara Banten, Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang, Banten", *Tesis Antropologi*, UI Jakarta, 1992.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004